

Mewujudkan Keadilan Politik di Era Globalisasi: Studi Kritis terhadap Ketimpangan dan Akses Kekuasaan

Aldi Sajian^{1*}, Ardan Alif^{2*}

¹Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Agama, UIN Mataram

²Program Studi Ilmu Hukum, Sosial Politik, Universitas Mataram

^{1*}aldisajian99@gmail.com, ^{2*}ardanaalif@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 4, No. 2, April 2025

Page: 350-355

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1637>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v4i2.1637>

Article History:

Received: 28-02-2025

Revised: 01-04-2025

Accepted: 05-04-2025

Abstrak : Keadilan politik merupakan prinsip fundamental dalam memastikan pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, di era globalisasi, dinamika politik sering kali mengalami kompleksitas baru yang memunculkan ketimpangan dalam akses kekuasaan. Globalisasi tidak hanya memengaruhi ekonomi dan budaya, tetapi juga memengaruhi struktur politik melalui arus informasi, tekanan transnasional, dan keterlibatan aktor global. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana ketimpangan politik muncul dan berlanjut dalam konteks globalisasi, serta bagaimana akses terhadap kekuasaan didistribusikan secara tidak merata di berbagai lapisan masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian literatur, dokumen kebijakan, dan studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya politik dan ketimpangan partisipasi publik berkontribusi terhadap terbatasnya penerapan prinsip keadilan politik. Penelitian ini menekankan perlunya strategi inklusif yang menyeimbangkan kepentingan lokal dan global, serta memperkuat mekanisme partisipasi demokratis sebagai upaya mewujudkan keadilan politik yang nyata di era globalisasi.

Kata Kunci : Keadilan, globalisasi, politik, kekuasaan, demokratis, pemerintahan inklusif.

PENDAHULUAN

Keadilan politik merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Prinsip keadilan politik menekankan pada pemerataan akses terhadap proses politik, partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan, serta distribusi kekuasaan yang adil tanpa diskriminasi. Dalam teori politik, keadilan politik sering dikaitkan dengan konsep kesetaraan, legitimasi pemerintahan, dan akuntabilitas publik. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa idealisme tersebut kerap mengalami tantangan serius, terutama di era globalisasi yang membawa perubahan sosial, ekonomi, dan politik secara massif (Bako et al., 2025).

Era globalisasi menghadirkan interaksi yang kompleks antara negara, masyarakat, dan aktor non-negara. Proses globalisasi tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi melalui liberalisasi

perdagangan, investasi asing, dan arus modal internasional, tetapi juga memengaruhi dinamika politik suatu negara. Perubahan ini muncul dalam bentuk tekanan politik transnasional, aliran informasi global yang cepat, serta meningkatnya peran aktor internasional yang memengaruhi kebijakan nasional. Akibatnya, distribusi kekuasaan di tingkat domestik menjadi semakin kompleks, di mana kelompok tertentu memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya politik dan pengaruh, sementara kelompok lain seringkali terpinggirkan. Ketimpangan ini menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan keadilan politik di era globalisasi (Tumanggor & Azhar, 2025).

Fenomena ketimpangan politik dapat diamati melalui beberapa dimensi. Pertama, akses terhadap lembaga pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan tidak merata di antara warga negara. Kelompok elit politik, kelompok ekonomi kuat, dan jaringan transnasional cenderung memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan agenda politik, sementara kelompok masyarakat marginal menghadapi keterbatasan dalam menyuarakan kepentingannya. Kedua, partisipasi publik dalam proses politik sering mengalami hambatan, baik berupa keterbatasan informasi, rendahnya kesadaran politik, maupun praktik diskriminatif yang membatasi akses kelompok tertentu. Ketiga, globalisasi menimbulkan tekanan eksternal yang memengaruhi kebijakan domestik, di mana kepentingan internasional atau korporasi multinasional terkadang mendominasi kepentingan local (Salsabila et al., 2024).

Dalam konteks ini, penelitian tentang keadilan politik menjadi sangat relevan. Studi ini mencoba mengeksplorasi bagaimana ketimpangan politik dan akses kekuasaan terbentuk serta berlanjut dalam masyarakat modern yang dipengaruhi oleh arus globalisasi. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, dengan analisis literatur, dokumen kebijakan, dan studi kasus yang menyoroti praktik ketimpangan politik di berbagai negara. Dengan pendekatan tersebut, penelitian berupaya memahami tidak hanya fenomena permukaan, tetapi juga faktor struktural dan sistemik yang memengaruhi distribusi kekuasaan (Aisy et al., 2025).

Ketimpangan politik yang muncul akibat globalisasi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Ketika akses kekuasaan tidak merata, kelompok masyarakat tertentu merasa termarginalkan, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan, konflik sosial, dan menurunnya legitimasi pemerintah. Sebaliknya, pemerataan akses politik dan penguatan partisipasi publik berpotensi meningkatkan akuntabilitas pemerintah, memperkuat kohesi sosial, dan mendorong pembangunan politik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya mewujudkan keadilan politik tidak hanya berkaitan dengan distribusi kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan demokrasi dan stabilitas social (Romarina, 2016).

Selain itu, era digital yang menjadi bagian dari globalisasi membawa peluang sekaligus tantangan baru dalam konteks keadilan politik. Teknologi informasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara luas dan berpartisipasi dalam diskursus politik melalui media sosial, platform daring, dan inisiatif e-government. Namun, akses digital yang tidak merata dapat memperburuk ketimpangan politik, di mana kelompok yang memiliki kemampuan teknologi tinggi memiliki pengaruh lebih besar, sementara kelompok yang kurang berdaya menghadapi keterbatasan dalam menyuarakan aspirasi politiknya. Oleh karena itu, literasi digital dan pemerataan akses informasi menjadi aspek penting dalam mewujudkan keadilan politik di era globalisasi (Khotimah et al., 2024).

Kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep keadilan distributif dan prosedural dalam teori politik. Keadilan distributif menekankan pemerataan akses terhadap sumber daya politik, sedangkan keadilan prosedural menekankan pada mekanisme partisipasi dan pengambilan keputusan yang adil. Kedua konsep ini saling melengkapi dan menjadi landasan dalam menganalisis ketimpangan politik. Penelitian ini juga

mempertimbangkan pengaruh faktor eksternal, termasuk tekanan global, arus informasi internasional, dan praktik demokrasi transnasional yang memengaruhi kebijakan nasional (Melia & Mesra, 2025).

Selain aspek teoritis, penelitian ini memiliki relevansi praktis. Pemahaman tentang ketimpangan politik dan akses kekuasaan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif, penguatan partisipasi publik, dan pengembangan mekanisme demokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan keadilan politik, baik di tingkat nasional maupun dalam konteks global (Tumanggor & Azhar, 2025).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis ketimpangan politik dan akses kekuasaan di era globalisasi, serta menelusuri mekanisme yang dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan politik. Pendekatan penelitian yang kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial-politik yang kompleks, memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam membangun sistem politik yang adil. Penelitian ini menekankan pentingnya strategi inklusif yang mampu menyeimbangkan kepentingan lokal dan global, serta memperkuat mekanisme partisipasi demokratis sebagai upaya mewujudkan keadilan politik yang nyata.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena ketimpangan politik dan distribusi kekuasaan di era globalisasi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi dinamika sosial-politik yang kompleks, yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui data kuantitatif semata. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, studi literatur dilakukan dengan menelaah buku-buku ilmiah, artikel jurnal, laporan kebijakan, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik keadilan politik dan globalisasi. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan kredibilitas akademik dan relevansinya terhadap fokus penelitian. Kedua, dilakukan analisis dokumen kebijakan publik dari berbagai negara yang mencerminkan tantangan dan strategi dalam mewujudkan keadilan politik. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola ketimpangan politik, mekanisme partisipasi publik, dan pengaruh aktor global terhadap kebijakan domestik.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan studi kasus komparatif. Beberapa negara dipilih sebagai representasi untuk menggambarkan variasi kondisi ketimpangan politik dan upaya penanggulangannya. Pemilihan kasus dilakukan dengan mempertimbangkan keragaman sistem politik, tingkat keterbukaan terhadap globalisasi, dan konteks sosial-budaya yang berbeda. Melalui perbandingan ini, penelitian berupaya mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi prinsip keadilan politik. Proses analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi kategori-kategori utama seperti distribusi kekuasaan, partisipasi publik, peran aktor global, dan implikasi sosial-politik. Kategori-kategori tersebut kemudian disusun untuk membangun narasi yang komprehensif tentang hubungan antara globalisasi dan keadilan politik. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari literatur akademik, dokumen resmi, dan studi kasus lapangan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana ketimpangan politik terbentuk dan berlanjut dalam masyarakat modern, serta menawarkan wawasan strategis bagi upaya mewujudkan keadilan politik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan politik di era globalisasi menjadi isu yang semakin kompleks karena proses globalisasi memengaruhi struktur politik, distribusi kekuasaan, dan partisipasi publik secara simultan. Globalisasi tidak hanya menghadirkan keterbukaan informasi dan interaksi lintas negara, tetapi juga menghadirkan ketimpangan dalam berbagai bentuk. Ketimpangan ini dapat bersifat struktural, ekonomi, maupun kultural, dan semuanya berdampak langsung pada akses warga negara terhadap kekuasaan politik. Dalam banyak kasus, kelompok elit politik dan ekonomi memiliki keunggulan signifikan dalam memengaruhi agenda politik, sedangkan kelompok marginal mengalami keterbatasan dalam partisipasi, pengambilan keputusan, dan perolehan sumber daya politik.

Salah satu dimensi utama ketimpangan politik adalah akses terhadap lembaga pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan. Di banyak negara, keputusan politik cenderung dikendalikan oleh kelompok tertentu yang memiliki jaringan kuat dan pengaruh politik tinggi. Fenomena ini terlihat dalam bentuk monopoli partai politik, dominasi kelompok kepentingan tertentu, atau peran aktor transnasional yang mampu memengaruhi kebijakan domestik. Ketimpangan ini tidak hanya membatasi partisipasi publik, tetapi juga mengurangi legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Kurangnya kepercayaan publik terhadap institusi politik dapat memicu alienasi politik, menurunnya partisipasi pemilih, dan konflik sosial yang bersifat laten maupun eksplisit.

Globalisasi menambah lapisan kompleksitas lainnya melalui arus informasi dan tekanan transnasional. Di satu sisi, globalisasi memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap pengetahuan politik, norma demokratis, dan praktik pemerintahan terbaik di dunia. Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan warga untuk mengkritisi kebijakan, mengorganisir gerakan sosial, dan menyuarakan aspirasi secara cepat. Namun, di sisi lain, globalisasi juga memperkuat ketimpangan akses karena kelompok yang memiliki kemampuan teknologi dan sumber daya lebih besar dapat memanfaatkan platform global untuk memperkuat posisi mereka. Hal ini menimbulkan paradoks di mana globalisasi yang seharusnya membuka akses dan partisipasi justru memperluas kesenjangan politik antara kelompok berdaya dan yang kurang berdaya.

Analisis kritis terhadap akses kekuasaan menunjukkan bahwa ketimpangan tidak hanya muncul dari faktor eksternal, tetapi juga dari struktur internal politik itu sendiri. Mekanisme partai politik, sistem pemilihan, dan birokrasi seringkali dirancang sedemikian rupa sehingga memperkuat status quo. Dalam konteks ini, teori keadilan distributif dan prosedural menjadi relevan. Keadilan distributif menekankan pada pemerataan sumber daya politik, termasuk akses terhadap jabatan publik, pengaruh kebijakan, dan fasilitas politik lainnya. Sementara itu, keadilan prosedural menekankan pada kesetaraan dalam mekanisme pengambilan keputusan, transparansi, dan perlindungan hak partisipasi publik. Kedua konsep ini saling melengkapi dan menjadi kerangka analisis yang kuat untuk memahami ketimpangan dan akses kekuasaan di era globalisasi.

Selain itu, faktor sosial dan ekonomi turut berperan dalam memengaruhi keadilan politik. Kesenjangan ekonomi berdampak langsung pada kemampuan individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam politik. Mereka yang memiliki sumber daya finansial, pendidikan, dan jaringan sosial yang kuat lebih mudah memanfaatkan peluang politik, sedangkan kelompok masyarakat miskin atau marginal seringkali terpinggirkan. Kondisi ini diperparah oleh praktik nepotisme, korupsi, dan pengaruh elit yang memperkuat dominasi kelompok tertentu. Dengan kata lain, keadilan politik tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial dan ekonomi, karena ketimpangan di satu bidang akan berdampak langsung pada ketimpangan di bidang lainnya.

Teknologi digital dan media sosial juga menjadi faktor penentu dalam distribusi kekuasaan politik di era globalisasi. Platform digital memberikan ruang baru bagi partisipasi publik, kampanye politik, dan penyebaran informasi. Namun, fenomena ini tidak selalu mengarah pada peningkatan keadilan politik. Disinformasi, polarisasi politik, dan algoritma yang mengutamakan konten populer dapat memperkuat bias dan memperlebar kesenjangan politik. Dengan demikian, literasi digital dan pemerataan akses informasi menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa teknologi mendukung, bukan menghambat, keadilan politik.

Studi kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa ketimpangan politik dapat muncul dalam bentuk dominasi kelompok elit, marginalisasi minoritas, dan keterbatasan partisipasi publik. Di beberapa negara berkembang, praktik oligarki politik masih sangat kuat, di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada beberapa keluarga atau kelompok ekonomi. Di negara maju, meskipun sistem demokrasi lebih mapan, ketimpangan dalam akses kekuasaan tetap terlihat melalui pengaruh lobi politik, donasi kampanye besar, dan kendali media. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan politik adalah tantangan universal yang memerlukan strategi kontekstual dan berlapis untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, strategi inklusif menjadi sangat penting. Pemerintah dan lembaga politik perlu mengembangkan mekanisme partisipasi yang memungkinkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok marginal. Reformasi sistem politik, peningkatan transparansi, dan penguatan pendidikan politik menjadi langkah penting untuk mengurangi kesenjangan dan memperkuat legitimasi demokrasi. Selain itu, integrasi nilai-nilai lokal dengan praktik global dapat menjadi strategi efektif untuk memastikan bahwa globalisasi tidak mengikis, tetapi justru memperkuat keadilan politik di tingkat nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mewujudkan keadilan politik di era globalisasi adalah tantangan kompleks yang melibatkan berbagai dimensi. Ketimpangan politik muncul akibat dominasi kelompok elit, keterbatasan akses publik, dan tekanan transnasional yang memengaruhi kebijakan domestik. Globalisasi membuka peluang bagi partisipasi publik dan pertukaran informasi, tetapi sekaligus memperluas kesenjangan bagi mereka yang kurang berdaya.

Akses kekuasaan yang tidak merata menjadi akar dari banyak permasalahan politik, mulai dari rendahnya legitimasi pemerintah, marginalisasi kelompok minoritas, hingga konflik sosial. Untuk itu, upaya mewujudkan keadilan politik memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup keadilan distributif, keadilan prosedural, pemerataan sumber daya politik, dan penguatan mekanisme partisipasi publik. Teknologi digital dan media sosial harus dimanfaatkan secara bijak untuk memperkuat partisipasi politik dan literasi masyarakat. Reformasi kebijakan, transparansi, dan pendidikan politik menjadi langkah strategis yang dapat menyeimbangkan distribusi kekuasaan. Integrasi nilai-nilai lokal dengan praktik global juga penting untuk memastikan bahwa globalisasi tidak merugikan, melainkan memperkuat demokrasi inklusif.

Secara keseluruhan, keadilan politik bukan hanya idealisme normatif, tetapi merupakan kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas sosial, legitimasi pemerintah, dan keberlanjutan demokrasi di era globalisasi. Penelitian ini menekankan pentingnya strategi inklusif, penguatan partisipasi publik, dan kesadaran kritis terhadap ketimpangan politik sebagai upaya nyata untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan demokratis bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, M. R., Fadia, M. F., Salsabila, M., & Putra, P. (2025). Perubahan Nilai dan Norma Pada Masyarakat: Studi Sosial di Era Globalisasi. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(6), 2219–2202.
- Bako, A., Hutabarat, P. K., Rahmadini, A., Aufa, A., & Nursaifa, A. (2025). Pendidikan politik dan pembentukan masyarakat inklusif-partisipatif dalam pembangunan demokrasi berkelanjutan. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 4(2), 216–225.
- Khotimah, U. K., Widianarti, T., Sari, S. A., Fauziah, S., & Nurbaiti, S. (2024). Komunikasi antar budaya di era globalisasi: Tantangan dan peluang. *Interaction Communication Studies Journal*, 1(3), 8–8.
- Melia, Y., & Mesra, R. (2025). Transformasi nilai-nilai budaya dan identitas sosial di era globalisasi: Perspektif sosiologis. *COMTE: Journal of Sociology Research and Education*, 1(6), 268–276.
- Romarina, A. (2016). Economic Resilience pada industri kreatif gunamenghadapi globalisasi dalam rangka ketahanan nasional. *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(1), 35–52.
- Salsabila, F. L., Widiyanarti, T., Ashari, S. D., Zahra, T., & Fadhilah, S. A. (2024). Pengaruh Globalisasi terhadap Perubahan Pola Komunikasi antar Budaya pada Generasi Z. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(4), 13–13.
- Tumanggor, T., & Azhar, A. A. (2025). Politik Identitas dalam Ruang Demokrasi Indonesia: Dinamika, Strategi, dan Implikasinya Terhadap Kohesi Sosial. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(2), 1417–1426.